

ABSTRAK

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* PADA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN AIR MINUM DAN SANITASI PROVINSI ACEH

Oleh : DRA. NURHAYATI,I, Ak,MSi,CA
DOSEN TETAP STIES BANDA ACEH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pengendalian Interen terhadap Penerapan *Good Cooperate Governance* Pada Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Aceh. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif asosiatip, yaitu mengetahui pengaruh variable independen pengendalian interen dengan variable dependen penerapan *Good Cooperate Governance* . Sampel penelitian ini sebanyak 56 orang responden, dengan menggunakan metode sensus, yaitu semua populasi yang memenuhi kriteria ikut diteliti. Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana dengan alat bantu analisis melalui SPSS 17. Dari hasil analisa selanjutnya dirumuskan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian Interen berpengaruh positif terhadap Penerapan *Good Cooperate Governance* Pada Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Aceh.. Hasil uji- t menunjukkan bahwa Hasil uji $t_{hitung} = 2.138 > \text{tabel } (2.00488)$ dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Disamping itu, hasil uji *R* pada *Model Summary* menunjukkan sebesar (*R square*) : 0.078 yaitu 8 %, yaitu dibatas 50 %, jadi pengaruhnya positif dan relatif kuat (relative kuat).

Kata Kunci : Pengendalian Interen, *Good Corporate Governace*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan organisasi di Indonesia semakin pesat baik organisasi sektor pemerintahan maupun non pemerintahan, seperti organisasi pemerintahan, Satuan kerja, rumah sakit, perusahaan bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagainya.. Perkembangan tersebut menuntut adanya pengelolaan atau tata kelola yang baik (*good governance*), yaitu suatu penyelenggaraan manajemen operasional yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi social dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. (Mardiasmo (2009:18).

Dalam upaya penerapan *good governance* yang baik bagi suatu organisasi publik, maka haruslah diimbangi dengan pengendalian intern yang baik pula yaitu memiliki kewenangan dan kualifikasi yang dibutuhkan secara efektif merupakan tujuan dari dilaksanakannya pengujian pengendalian intern (Wirada, dkk, 2013:131).

Pengendalian Intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu organisasi untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong di taatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan, (Standar Profesional Akuntan Publik, 2011). Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 mendefinisikan bahwa sistem pengendalian intern yang selanjutnya disebut dengan sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan pentingnya pengaruh pengendalian intern dalam organisasi guna meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*), maka salah satu organisasi yang tidak kalah pentingnya Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Aceh, berkedudukan di Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat Satker PAMS Propinsi Aceh. Dalam mengelola tata krlola yang baik (*good governance*),

Satuan Kerja PAMS Provinsi Aceh mempunyai struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang pejabat yaitu Kepala Satuan dan dibantu oleh beberapa asisten yaitu asisten umum, asisten BUMN, Asisten Perencanaan dan Pelapooan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Kepala Satuan PAMS membawahi langsung empat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu PPK Pembinaan Teknis, PPK Pengembangan Air Minum, PPK Persampahan dan PPK Air Limbah. Dengan adanya struktur organisasi tersebut, maka Tugas pokok Satuan Kerja PAMS Propinsi Aceh adalah memberikan pembinaan teknis tentang penanganan persampahan dan air bersih, dan air limbah di Aceh dengan bekerjasama dengan Perusahaan Air Minum Perusahaan Daerah Aceh serta berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya Aceh.

Namun, pengamatan sementara penulis dilapangan, bahwa masih terdapat permasalahan atau fenomena dalam tata kelola (*good governance*) yaitu tata kelola Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Aceh belum berjalan secara optimal dan masih perlu ditingkatkan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih bermasalah dan mengeluh dengan kebutuhan penggunaan air bersih di Banda Aceh dan daerah lainnya di Aceh, penanganan sampah dan limbah yang belum baik. Disamping itu, laporan keuangan yang belum *transparency, fairness, responsibility dan accountability, (efficiency), responsibility (tanggung jawab yang jelas)* dan *fairness* (kewajaran). Hal ini diprediksi disebabkan dalam pelaksanaan *good governance* belum didukung dengan atau lemahnya pengendalian nteren diantaranya lemahnya unsure sistem informasi dan komunikasi akuntansi, aktivitas pengendalian dan pemantauan, sehingga public belum mendapat informasi yang wajar tentang tata kelola Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti berkeinginan melakukan penelitian ilmiah dengan diberi judul tersebut diatas.

LANDASAN TEORI

2.1. *Good Governance*

2.2.1 Definisi *Good Governance*

Good governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan baik pada bisnis perusahaan maupun organisasi lainnya. *Good governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan

terhadap kehidupan organisasi termasuk hubungan dengan masyarakat, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *the stakeholders*.

Menurut *Forum Coorate Governance in Indonesia* dalam Irmala Sari, (2010:22) mendefinisikan bahwa *good governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan dengan kepentingan secara interen dan ekteren lainnya sehubungan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain system yang mengarahkan dan mengendalikan atau tata kelola yang baik dalam oragnisasi tersebut. Dikalangan bisnis secara umum GG diartikan tata kelola yang baik pada perusahaan, sedangkan disegi social GG diartikan tata keloayang baik bagi oegaansasi social (public). Dengan GG ini diartikan yang mengatur dan mengendalikan guna memberikan niali taambah bagi organisasi tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut F. Antonius Alijoyo (2003) dalam Andriyati M.Sinaga (2011:04) mendefinisikan :

Good governance adalah sebagai seperangkat aturan dan prinsip antara lain *fairness, transparency, accountability* dan *responsibility* yang mengatur hubungan antara masyarakat, pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta *stakeholder* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder* baik dalam organisasi bisnis maupun organisasi non bisnis..

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2008. menjelaskan pengertian tata kelolaan pemerintahan yang baik, yaitu : pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

2.2.2 Prinsip Good Governance

Menururt *Organization for Economic Corporation and Development* 2004 (OECD) dalam Andriyanti M.Sinaga, (2013:14-15) menyusun prinsip-prinsip yang mengatur *good corporate governance*, diantaranya: seperti *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* (TARIF) seperti halnya sebagai berikut:

1. Transparency (Transparansi)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan

2. Accountablity (Akuntabilitas)

Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Adanya kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. *Independency* (Independensi)

Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.

Menurut Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 dalam Morita Indah Lestari, (2013:16) menetapkan Prinsip-prinsip *good governance* yang digunakan adalah (a) *transparancy*, (b) *independency*, (c) *accountability*, (d) *responsibility*, dan (e) *fairness*.

Transparansi

Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Selain itu, menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menjelaskan bahwa transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Independensi

Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 mendefinisikan independensi sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selanjutnya menurut KNKG menjelaskan bahwa independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Akuntabilitas

Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 mendefinisikan akuntabilitas sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Selanjutnya menurut KNKG menjelaskan bahwa akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pengertian lainnya diuraikan oleh Kumaat (2011:23) akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab korporasi yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komprehensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku.

Pertanggungjawaban

Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 mendefinisikan pertanggungjawaban sebagai kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selanjutnya menurut KNKG menjelaskan bahwa pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung

jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Kewajaran

Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 mendefinisikan kewajaran (*fairness*) sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut KNKG menjelaskan bahwa kewajaran (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya.

2.2.3 Dimensi atau indikator pelaksanaan *Good e Governance*

Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri sebagai indikator (Ni Made, 2014:37) yaitu :

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain semacam *benchmark* (acuan)
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena melalui sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
- e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

2.2. Pengendalian Intern (*Internal Control*)

2.2.1 Pengertian Pengendalian Intern (*Internal Control*)

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2007) dalam Panji, Krishna, Drs, Ak, MBA. (2005 :121) mendefinisikan bahwa Pengendalian Intern di definisikan sebagai berikut : Sistem Pengendalian Intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong di taatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Disamping itu, menurut *The Institute of Internal Auditor* (Sawyer et al, 2005:34) adalah:

.....setiap tindakan yang diambil manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kontrol bersifat preventif (untuk mencegah terjadinya hal-hal yang diinginkan), detektif (untuk mendeteksi dan memperbaiki hal-hal yang tidak diinginkan yang telah terjadi), atau direktif (untuk menyebabkan atau mengarahkan terjadinya hal yang diinginkan). Konsep sistem kontrol merupakan gabungan komponen kontrol yang terintegrasi dan aktivitas-aktivitas yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasarannya”.

2.2.2 Komponen Pengendalian Intern

SAS mendefinisikan lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan pada pernyataan COSO sebagai indikator (Sawyer et al, 2008:81) yaitu:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Penentuan risiko,
3. Aktivitas pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi
5. Pengawasan.

Menurut Murtanto (2005:121) pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) komponen, yang diturunkan dari cara penyelenggaraan bisnis oleh manajemen dan terpadu dengan proses manajemen. Kelima komponen tersebut adalah lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*riskassessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*) dan pemantauan (*monitoring*).

Control environment (lingkungan pengendalian), menunjukkan atmosfir atau suasana (*sets the tone*) dalam suatu organisasi/ perusahaan yang mempengaruhi kesadaran pengendalian (*control consciousness*) dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi bagi komponen lainnya dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan dari atas atau *tone at the top*.

Risk assessment (penilaian risiko), merupakan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola berbagai risiko dalam organisasi dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Control activities (aktivitas pengendalian), mencakup kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksanakan sesuai dengan arahan manajemen secara efektif.

Information and communication (informasi dan komunikasi), sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional.

Monitoring (pemantauan), merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian intern, termasuk modifikasi dan penyempurnaannya apabila diperlukan Terdapat hubungan langsung antara ketiga kategori tujuan yang harus dicapai dengan kelima komponen pengendalian intern (menunjukkan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan).

Menurut PP nomor 60 tahun 2008 pasal 4 dalam Suprayogi, Angga. 2010:17) menjelaskan bahwa komponen yang harus diterapkan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian terdiri dari:

1. penegakan integritas dan nilai etika;
2. komitmen terhadap kompetensi;
3. kepemimpinan yang kondusif;
4. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM;
7. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
8. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

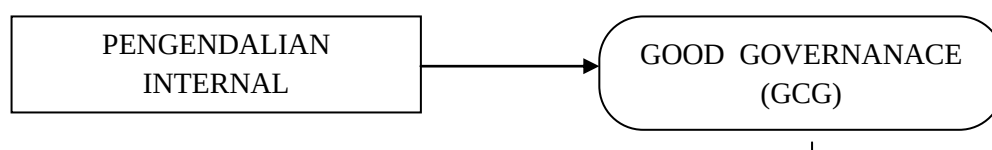
2.3 Hubungan antara Pengendalian Internal dan Pelaksanaan *Good Governance*

Hubungan antara pengendalian internal dan *good governance* telah terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2011) dan Pratolo (2007) dalam Wiratno, Adi, Umi Pratiwi dan Nurkhikmah. (2013:121). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadillah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) seluruh Indonesia, hasilnya membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*. Hasil yang sama juga Made Asih Ristanti, dkk (2014: 09) melakukan penelitian

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai variabel dependen dengan engendalian Intern sebagai variabel independen (Sugiyono, 2008:87).

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk diagram, dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dinyatakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ho : Pengendalian Iteren tidak berpengaruh terhadap *Good Governan* Pada Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Aceh .

Ha : Pengendalian Interen berepengaruh Terhadap *Good Governance* pada Satuar Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Aceh .

III. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono, (2014:148) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai identitas dan krakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan skedar jumlah, yang ada pada objek/subjek yang diperlajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik, sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dilingkungan Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Aceh yang berjumlah 97 orang dengan memiliki kriteria (populasi sasaran) sebagai berikut :

1. Unsur pimpinan sebagai Pejabat dilingkungan Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Aceh
2. Pegawai tetap sebagai staf yang aktif dan terlibat langsung dalam tata kelola Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Aceh .

Setelah penetapan kriteria tersebut maka jumlah populasi yang memenuhi Kriteria tersebut berjumlah 56 responden. Secara rinci, jumlah populasi sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3 - 1
Personl yang memenuhi kriteria
Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Aceh

NO	JENIS RESPONDEN	JUMLAH
1	Kepala Satker (eselon II)	1
2	Unsur Pimpinan (eselon III)	9
2	Unsur pimpinan (setingkat eselon IV)	24

3	Petugas / Karyawan Senior	14
4	Pejabat fungsional	8
	Jumlah	56

Sumber data: Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Aceh

3.2 Metode Pengumpulan Data

Jenis data penelitian ini adalah data subjek (*self report data*), yaitu jenis data berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data dengan memberikan kuesioner kepada responden, sebanyak 56 responden. (Kuncoro,2003 dalam Ira, Dkk, 2013:16).

3.3 Definisi dan Operasional Variabel

Definisi masing-masing variabel, indikator, dan skala pengukuran dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Good Governance (Y)	<i>Good governance</i> adalah seperangkat aturan dan prinsip antara lain yang mengatur hubungan antara masyarakat, pemilik orgsnidsdi pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta <i>stakeholder</i> lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. (<i>Organ ization for Economic Corporation and Development</i> 2004)	1. <i>Independen</i> , 2. <i>transparency</i> 3. <i>accountability</i> 4. <i>responsibility</i> 5. <i>Fairness</i>	Interval
Pengendalian Internal (X)	pengendalian intern adalah suatu proses berkesinambungan yang dirancang, diimplementasikan, dipelihara dan dipengaruhi oleh manusia dalam suatu organisasi, khususnya pimpinan, untuk mencapai berbagai tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(COSO dalam Sawyer et al, 2008)	1.Lingkungan pengendalian, 2. Penentuan risiko, 3.Aktivitas engendalian, 4.Informasidan komunikasi 5. Pengawasan	Interval

3.4 Pengujian Kuaalitas Data

1. Uji Validitas

Untuk mengetahui skor masing-masing item peertanyaan valid atau tidak, maka ditetapkan kriteria statistik(Imam Ghozoli, 2007:143) sebagai berikut :

1. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ table}$ dan bernilai positif, maka variable tersebut valid

2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka variable tersebut tidak valid.
3. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ tetap negative, maka H_0 akan ditolak dan H_1 diterima.

2. Uji Keandalan (Reliability)

Untuk mengukur keandalan kuesioner, digunakan uji reliabilitas. Umumnya pendekatan yang digunakan adalah dengan cara menghitung *Cronbach Alpha* masing-masing variable yang terlibat. *Cronbach Alpha* menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variable yang ada. Uji ini dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrument yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga dapat dipakai dengan baik pada kondisi yang berbeda-beda. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan Cronbach Alpha adalah sebesar 0.60 (Malhotra, 2004:23).

3.5 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik minimal terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas karena variable independden relatif kecil, yaitu satu variable independden (Ghozali, (2006, dalam Ira, Dkk, 2013:6) :

3.6 Metode Analisa Data

Adapun bentuk matematisnya regresi linier sederhana (Ghozali 2007:67) sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Penerapan *Good Governance*
- α = Konstanta
- β , = Koefisien Regresi
- X = Pengendalian Internal
- ε = Error term

3.6 Rancangan Pengujian Hipotesis

Untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dan sesuai dengan regresi sederhana yang digunakan, maka dilakukan uji secara parsial (uji-t) untuk mengetahui pengaruh pengendalian interen terhadap penerapan prinsip good cooperate governance pada Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Aceh

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
GOOD GOVERNANCE	4.7723	0.23256	56
INTERNAL CONTROL	4.2071	0.28017	56

Sumber : Data primer (diolah), 2015

Dari tabel 4.3 di atas menunjukkan hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel dari 56 responden. Variabeli Nilai *internal control mean* sebesar 4.2071. Hal ini mengindikasikan bahwa internal control relatif tinggi, yaitu relative baik., sedangkan nilai *good govermant* 4.7723, berarti bahwa *good govermant* yang dicapai sebesar 4.7723.

4.4 Hasil Uji Validitas dan Realibitas

4.4.1. Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas data ditampilkan pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Data

a. Variabel Internal Control (X)

Kode	Koefisien Korelasi (r_{hitung})	Nilai Kritis (r_{tabel})
B1	0.481	0.266
B2	0.447	0.266
B3	0.394	0.266
B4	0.453	0.266
B5	0.540	0.266

b. Variabel *Good Governmant* (Y)

Kode	Koefisien Korelasi (r_{hitung})	Nilai Kritis (r_{tabel})
B1	0.479	0.266
B2	0.426	0.266
B3	0.426	0.266
B4	0.404	0.266
B5	0.638	0.266

Sumber: Data Primer 2015, (diolah)

Dari penyajian validitas data diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh masingmasing item dari variabel *internal control* dan *good govermant* berada diatas nilai kritis korelasi *product moment* (koefisien korelasi > 0.266, sehingga kuesioner yang digunakan dinyatakan valid.

4.4.2. Hasil Uji Reabilitas

Uji reabilitas dapat disaajikan dalam tabel 4.4 disajikan hasil uji reabilitas.

Tabel 4 -4
Hasil Uji Reliabilitas Data

No	Variabel	Rata-rata	Jumlah Item	Nilai Alpha	Keandalan
1	<i>Internal Control</i>	15.8333	5	0.648	Handal
2	<i>Good Governmant</i>	31.4444	5	0.702	Handa

Sumber: Data Primer 2015 (diolah)

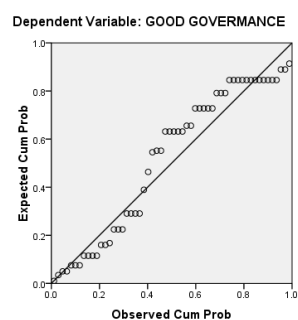
Berdasarkan realiability terlihat bahwa nilai koefisien *alpha cronbach* untuk masing-masing variable berada diatas adalah 0.50. Dengan demikian pengukuran reliabilitas terhadap variabel penelitian menunjukkan bahwa pengukuran keandalan memenuhi kredibilitas *Cronbach Alpha* dimana nilai alphanya sama atau lebih besar dari Alpha 0.50, (Malhotra, 2005 : 305). Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini sangat baik dan layak untuk digunakan.

4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Hasil Uji Normalitas

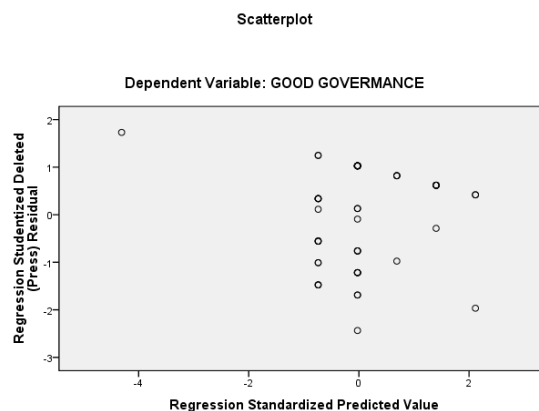
Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Tampilan grafik normal *probability plot* pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

4.5.2. Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas tersebut bahwa penyebaran titik tidak ada membentuk pola yang jelas serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

4.6. Hasil Uji Hipotesis

4.6.1. Hasil Pengujian Regresi

Tabel 4 - 5
Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.797	.457		8.302	.000
INTERNAL CONTROL	0.232	.108	.279	2.138	.037

a. Dependent Variable: GOOD GOVERNANCE

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 17.0 seperti terlihat pada Tabel 4.6 di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 3.797 + 0.232X + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut : nilai konstanta sebesar 3.797 . Artinya bilamana faktor internal control tetap, maka *good govermant* pada Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Aceh, mengalami kenaikan sebesar 3.797.

Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R²)

Hasiuji Korelasi dan determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4 - 6
Hasil Analisis Determinasi
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.279 ^a	0.078	0.061	0.22536	0.938

a. Predictors: (Constant), INTERNAL CONTROL

b. Dependent Variable: GOOD GOVERNANCE

Sumber : Data primer (diolah), 2015

Dari Tabel 4.6 menunjukkan bahwa : a) nilai koefisien korelasi/hubungan (R) : 0.279^a dan pengaruh (R Square) = 0.078. Hal ini berarti bahwa *good govermant* dipengaruhi faktor interal control sebesar 0.8 %. Sementara sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain.

4.6.2 Uji Secara Parsial.

Hasil uji parsial lebih jelasnya pada tabel 4.7.

Tabel 4 -7
Pengujian Hipotesis secara Parsial (t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3.797	.457		.000
	INTERNAL CONTROL	0.232	.108	.279	.037

a. Dependent Variable: GOOD GOVERNANCE

Berdasarkan table 4.7 maka koefisien regresi secara parsial sebagai berikut :

Hasil pengujian data diketahui bahwa internal control mempunyai $t_{hitung} = 2.138 > \text{tabel}$ (2.00488) dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa variable *internal control* secara parsial berpengaruh positif terhadap *good governance* pada Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Aceh.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Secara parsial terdapat pengaruh positif internal control terhadap *good governance*, pada Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Aceh. Hasil uji $t_{hitung} = 2.138 > \text{tabel}$ (2.0488). Hal ini mengindikasikan bahwa besar-kecilnya terjadi peningkatan internal control yang dilakukan Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Aceh akan mempengaruhi *good governance*, Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Aceh.
2. Hubungan antara variabel *internal control* terhadap *good governance*, relative kurang kuat, hal ini dapat dilihat hasil uji R pada *Model Summary* yaitu sebesar 0.8 atau 0.078%, yaitu dibawah 50 %, jadi hubungan positif akan tetapi relatif kurang kuat.

5.2. Saran

1. Disarankan kepada Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Aceh untuk mempertahankan dan meningkatkan *good governance* dengan meningkatkan *fungsi internal control* seperti jangan ada lagi kerja rangkap, menempatkan personil sesuai dengan keahliannya dan meningkatkan pengawasan melekat terhadap bawahan.
2. Disarankan Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Aceh juga meningkatkan fungsi non internal control seperti fungsi internal audit, fungsi monitoring dan fungsi pengawasan melekat dan sebagainya. sehingga dapat meningkatkan pengawasan dilingkungan Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Aceh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andriyatim Sinaga, (2011) *Pengaruh Elemen Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Sektor Perbankan di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Undeip, Semarang;
- Ghozali, Imam. 2007. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2006. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS**. Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Habibie. 2013. **Pengaruh Pengawasan DPRD, Pengendalian Internal, dan Peran Auditor Internal terhadap Good Governance (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Solok)**, Skripsi. Universitas Negeri Padang
- Mardiasmo. 2009. “**Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance**”. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2, No. 1, Mei 2009
- Morita Indah Lestari, (2013), *Pengaruh Budaya Organisasi Dan Pengendalian Interen Terhadap Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Umum di Kota Padang, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang*
- Ni Made Asih Ristanti, Ni Kadek Sinarwati, Edy Sujana, (2014), **Pengaruh Sistem Pengendalian Interen, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi Terhadap Good Governance**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Panji, Krishna, Drs, Ak, MBA. 2005. “**Sistem Pengendalian Intern**”. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Persiapan dan Kesiapan dalam Penyusunan dan Audit atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah pada tanggal 25 Mei 2005. Jakarta. pp.3.
- Penerapan Good Governance (Studi Kasus Pada satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Tabanan), Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurnal Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 101 Tahun 2008, tentang Tata Kelola Pemerintahan , Jakarta;
- Irmala Sari, (2010), **Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional ((Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)**, Skripsi, Fakultas Ekonomi Undp, Semarang;
- Ruspina, Depi Oktia. 2013. **Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Padang)**, Skripsi. Universitas Negeri Padang

- Sawyer et al. 2005. Sawyer's **Internal Auditing**-Buku 1. 5th ed. Salemba empat. Jakarta. Indonesia.
- Sawyers, Lawrence B (2009), **Internal Audit**, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono. 2008. "**Meode Penelitian Bisnis**". Alfabeta, CV. Bandung. Indonesia.
- Supriyono. (2000). **Sistem Pengendalian Manajemen**, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. 2014. **Metode Penelitian Manajemen** . Bandung: Alfabeta.
- Suprayogi, Angga. 2010. **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)**, Skripsi. Universitas Pasundan. Bandung
- Wiratno, Adi, Umi Pratiwi dan Nurkhikmah. 2013. **Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Good Governance Serta Implikasinya Pada Kinerja (Survey Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tegal)**, Jurnal. Vol 3, No 1 (2013): *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers (SCA-3)*. Universitas Jenderal Soedirman
- Wirda, dkk. 2012. **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perbankan di Kota Banda Aceh**. Jurnal Akuntansi. Volume 1, No. 1. <http://www.tabanankab.go.id/> (diakses tanggal 11 November 2013) <http://birokrasi.kompasiana.com> (diakses tanggal 11 November 2013) <http://infokorupsi.com> (diakses tanggal 11 November 2013)